



Judul : Kaidah Ilmiah Harus Diikuti
Tanggal : Kamis, 15 April 2021
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 8

| VAKSIN NUSANTARA |

KAIDAH ILMIAH HARUS DIKUTI

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pengembangan Vaksin Nusantara setelah mengikuti proses uji klinis. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa pengembangan vaksin tetap harus melewati kaidah-kaidah ilmiah.

Aprianus Doni Tolok, Mutiara Nabila & Oktaviano DB Hana
redaksi@bisnis.com

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengatakan bahwa proses yang dilakukan sejumlah anggota DPR adalah untuk uji klinis fase kedua.

Untuk penggunaan secara massal selanjutnya tetap menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kita tunggu saja rekomendasi dari Badan POM, selaku pihak berwenang yang mengeluarkan izin penggunaan vaksin di Indonesia," ujar Nadia kepada *Bisnis*, Rabu (14/4).

Terkait dengan belum adanya izin dari BPOM untuk uji klinis fase II terhadap Vaksin Nusantara, Nadia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya pemerintah akan

memastikan keamanan dari setiap vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi.

"Oleh karenanya, dalam pengembangan vaksin harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang sudah diakui dan sesuai standar WHO," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ikut dalam proses uji klinis Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (14/4) mengatakan pengembangan vaksin besutan eks Menkes Terawan Agus Putranto tersebut harus didukung penuh.

Menurutnya, Vaksin Nusantara adalah buatan dalam negeri yang bisa diandalkan. Sementara pasokan vaksin dari luar masih sulit masuk Indonesia karena ada embargo dari negara-negara penghasil vaksin.

"Kita harus *support* vaksin yang

ada. Dengan adanya Vaksin Nusantara, akan menambah kekayaan vaksin dalam negeri sehingga bisa kemudian membantu pemerintah menekan laju Covid-19 di negara kita. Ini tidak perlu diperdebatkan," katanya.

Menurut Dasco, BPOM juga sudah mempersilakan uji fase kedua terhadap Vaksin Nusantara sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

"Kalau dari rapat dengar pendapat, BPOM sudah menyetujui uji fase 2. Kita sudah ada notulensi rapat dan lainnya, saya pikir jangan kemudian DPR diadu-adu dengan BPOM, karena tujuannya sama bagaimana vaksin bisa berlangsung dengan baik di negeri kita," tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan

Daulay yang juga ikut dalam proses vaksinasi Covid-19 menggunakan Vaksin Nusantara.

Menurut Saleh, vaksin tersebut efektif dalam rangka meningkatkan imunitas. "Minat terhadap Vaksin Nusantara ini ternyata sangat tinggi, terbukti dengan antrean panjang yang ada," katanya.

Dia mengakui telah berdiskusi dengan para peneliti vaksin tersebut asal Indonesia maupun Amerika Serikat (AS). Setelah mendapatkan penjelasan dari para peneliti, dia percaya bahwa vaksinasi tersebut sangat baik dan efektif dalam rangka meningkatkan imunitas.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih menegaskan bahwa vaksin hanya boleh digunakan bila telah

mengantongi izin dari BPOM.

"Vaksin boleh digunakan kalau ada izin edar atau izin emergency use dari otoritas BPOM. Kalau belum ada, tidak bisa dan tidak boleh digunakan," ujarnya dilansir *Antara*.

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menegaskan bahwa instansinya tidak pilih kasih terkait uji klinis vaksin apapun termasuk vaksin Nusantara.

BPOM akan mendukung apapun bentuk riset apabila sudah siap masuk uji klinis itu akan didampingi tetap tapi tentu dengan penegakan berbagai standar-standar yang sudah ada.

Vaksin Nusantara belum bisa lanjut ke tahap uji klinis selanjutnya karena beberapa syarat belum terpenuhi. ▣